

LAPORAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023



DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-2 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi u atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akun tabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggung jawaban kepada Masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan. Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan diukur atas dasar penilaian indicator kinerja utama (IKU) yang merupakan indicator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civilsociety* sebagai bagian integral dari pembaharuan system administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kisaran , Januari 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ASAHAN

SOFIAN MANULLANG S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660212 198602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Anggaran.....	31
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
BAB IV PENUTUP	39

LAMPIRAN

SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH

MATRIKS RENSTRA

SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub system dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akun tabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan diwajibkan untuk Menyusun Laporan Akun tabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

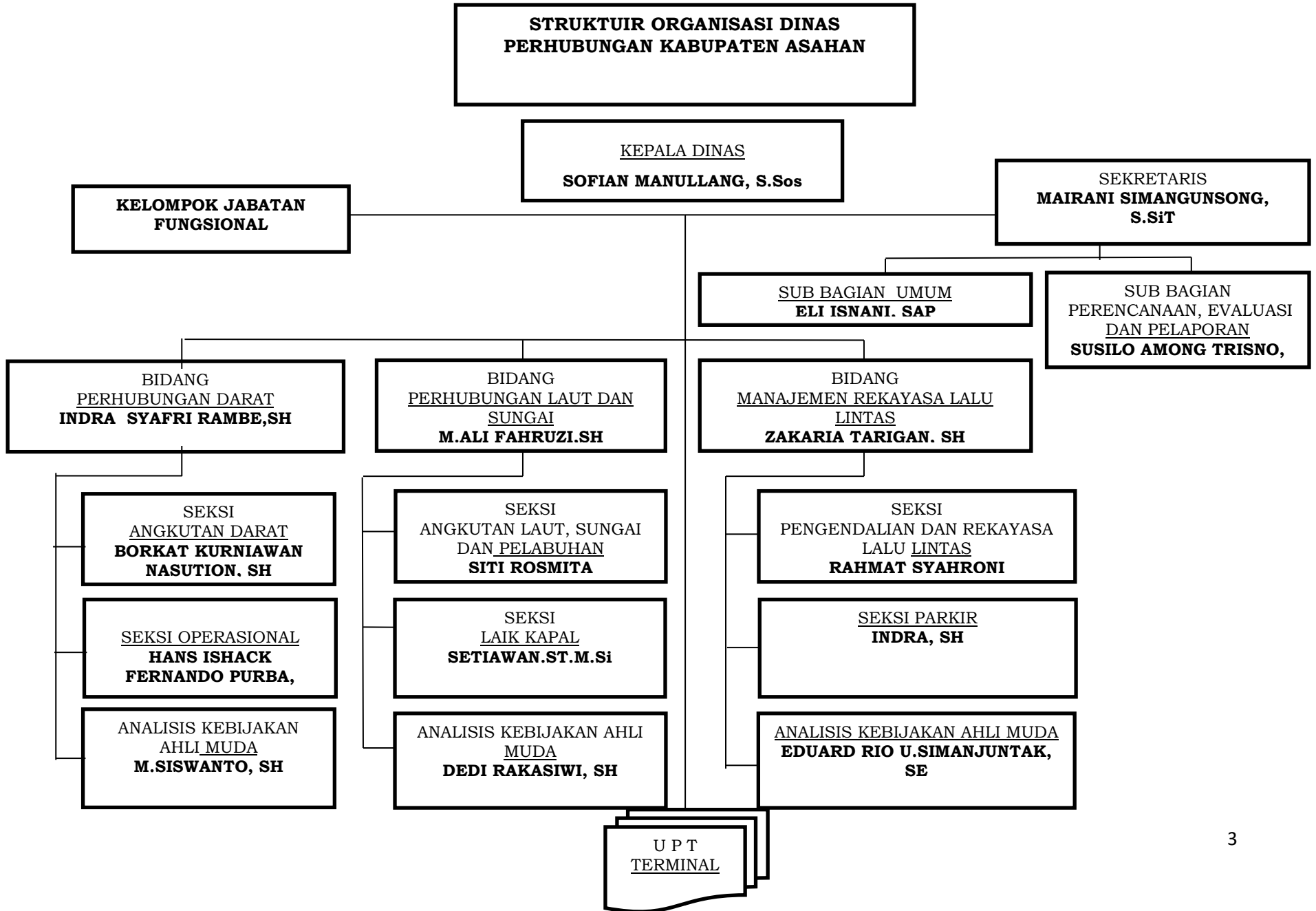
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan dan Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan adalah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan yang

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- Perencanaan
- Pelaksanaan kebijakan
- Pengendalian,
- Evaluasi
- Pelaporan
- Pelayanan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bagian. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi



B. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang Pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat pengujian kendaraan bermotor yang memadai ;
2. Fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, Traffic Light, Warning Light, Marka dan fasilitas keselamatan jalan) masih harus dilengkapi dengan pemasangan baru.
3. Pembangunan sarana dan prasarana angkutan umum yang memadai sebagai Upaya pemerintah menyediakan pelayanan terhadap kebutuhan Masyarakat untuk mobilitas baik tujuan untuk bekerja mau pun pendidikan;
4. Penyediaan sarana dan prasarana untuk angkutan perairan untuk distribusi orang dan barang serta pemerataan pelayananguna menghilangkan kesenjangan antar wilayah;
5. Memaksimalkan fungsi jalan melalui pengelolaan parkir sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tujuan tertib lalu lintas dan menjaga keselamatan pengguna jalan ;
6. Penyebar luasan informasi tentang aturan – aturan yang berlaku dibidang lalu lintas harus dilaksanakan karena masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan Masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas ;
7. Pengembangan dan peningkatan profesionalis meaparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan serta pemenuhan kebutuhan fasilitas

pendukungnya (sarana dan prasarana aparatur) guna mendukung tercapainya pelayanan prima dibidang transportasi baik darat maupun perairan;

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Keselamatan transportasi
2. Fasilitas perlengkapan jalan
3. Memaksimalkan fungsi jalan
4. Penyebarluasan informasi tentang aturan – aturan yang berlaku dibidang lalu lintas.

C. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (lembar Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

5. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);
6. Peraturan Bupati Asahan Nomor23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten AsahanTahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 24).

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten 2023 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41). Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Asahan.

Visi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 adalah:

Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, profesional, dan akuntabel
2. Meningkatkan Kerjasama antar pelaku usaha dan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah;
3. Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi;
4. Menciptakan iklim yang kondusif dan kemudahan investasi bagi pengembangan usaha dalam menciptakan lapangan kerja;
5. Meningkatkan akurasi proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan APBD yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan menumbuhkan partisipasi Masyarakat dalam memelihara kesehatan;

7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan daya dukung generasi muda yang meleleknologi dan budaya literasi tinggi;
8. Mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
9. Meningkatkan kualitas Pembangunan infrastruktur yang berorientasi mendukung produktivitas dan pengembangan Kawasan strategis;
10. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, berkelanjutan dan bernilai ekonomis;
11. Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang demokratis, rukun dan gotong royong;
12. Meningkatkan perlindungan dan penanggulangan masalah social kemasyarakatan yang berbasis pada kompetensi sumber daya manusia.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan mengacu pada Misi ke-9, yaitu :

“Meningkatkan kualitas Pembangunan infrastruktur yang berorientasi mendukung produktivitas dan pengembangan Kawasan strategis “

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan Analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi

Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menurunkan kesenjangan Pembangunan antar wilayah							
		1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana angkutan umum	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	36,00	36,50	37,00	37,50	38,00

Sumber :Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu Upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan tahun 2023 adalah sebagai berikut;

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	<i>Menurunkan kesenjangan Pembangunan antar wilayah</i>						
	<i>Meningkatnyakwalitas dan kwantitassarana dan prasaranaangkutanumum</i>	1	<i>Cakupanaksesi bilitasantar wilayah</i>	%	<i>Berapa persen jalan Kabupaten yang di lalui oleh moda transportasi</i>	<i>Panjang jalan kabupaten yang dilalui moda transportasi public dibagi Panjang jalan kabupaten di kali 100%</i>	<i>Dinas Perhubungan</i>

Sumber :Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan KabupatenAsahanTahun 2023

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2023 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2023
Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Kabupaten/Kota ...

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	<i>Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah</i>					
		1.1	<i>Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana angkutan umum</i>	<i>Cakupan aksesibilitas antar wilayah</i>	%	36,50

Sumber : Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Kabupaten Tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk Menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2023 mengacu pada

dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 10 Januari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	<i>Menurunkan kesenjangan Pembangunan antar wilayah</i>			
	<i>Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana angkutan umum</i>	<i>Cakupan aksesibilitas antar wilayah</i>	%	36,50

Sumber :Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan:

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2023

No	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	<i>Kegiatan:</i>			
	A. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			
	<i>Sub Kegiatan:</i>			
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	9.900.000
	B. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
	<i>Sub Kegiatan:</i>			
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	3.478.445.374
	C. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	163.930.000
	2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang	81.052.750
	D. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			
	<i>Sub Kegiatan:</i>			
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.985.327
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.532.500
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	29.998.750
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.065.000
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	47.249.500
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	15.186.000
	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.356.250
	8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	140.000.000
	E. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
	<i>Sub Kegiatan:</i>			
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	390.000.000

	2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	19.671.500
	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan/Diadakan	1	Unit	130.001.000
	F. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
	Sub Kegiatan:					
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lap	5.000.000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lap	175.077.871
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Lap	15.010.000
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lap	2.402.229.000
	G. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
	Sub Kegiatan:					
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	Unit	490.398.186
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	104.836.200
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	44.433.600
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
	Kegiatan:					
	A. PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/ KOTA					
	Sub Kegiatan:					
	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Dok	100.000.000
	B. PENYEDIAAN PERLENGKAAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA					
	Sub Kegiatan:					
	1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4	Paket	96.278.322
	2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan	4	Paket	914.600.000

	Kabupaten/Kota	Terpelihara			
C.	PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C				
	Sub Kegiatan:				
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1	Unit	10.000.080
D.	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR				
	Sub Kegiatan:				
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Lap	200.416.525
E.	PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR				
	Sub Kegiatan:				
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2	Unit	100.000.000
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Orang	32.000.000
3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	12	Bulan	56.694.000
4	Penyediaan Buku Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.000	Dok	150.000.000
5	Sosialisasi Standar operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Lap	50.130.000
6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	8	Unit	125.997.133
F.	PELAKSANAAN MANAJEMEN REKAYASA LALULINTAS				
	Sub Kegiatan:				
1	Pengadaan, Pemasangan, perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka manajemen rekayasa lalulintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	25	Unit	35.600.000
2	Forum Lalu-Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Lap	15.000.000
G.	PERSETUJIAN HASIL ANALISA DAMPAK LALULINTAS				
	Sub Kegiatan:				
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	1	Lap	30.032.500
H.	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA				

	Sub Kegiatan:				
	1 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Lap	244.850.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
	Kegiatan:				
	A. PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN DAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN UNTUK KAPAL YANG MELAYANI PENYEBERANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Sub Kegiatan:				
	1 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Dok	
	2 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Dok	38.656.100
	B. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal				
	Sub Kegiatan:				
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	1	Dok	
	JUMLAH TOTAL				10.035.613.468

Sumber :Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutase pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 1 Nopember tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

**Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan
Tahun 2023**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	<i>Menurunkankesenjanganp embangunanantar wilayah</i>			
	<i>Meningkatnya kualitas dan kwantitas sarana dan prasarana angkutan umum</i>	<i>Cakupan aksesibilitas antar wilayah</i>	%	36,50

Sumber : *Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2023*

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Taun 2023

NO	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target		Anggaran (Rp)
1	2				3
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	<i>Kegiatan:</i>				
	A. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				
	<i>Sub Kegiatan:</i>				
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dok	9.900.000
	B. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
	<i>Sub Kegiatan:</i>				
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang	3.299.384.930
	C. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	163.930.000
	2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500	Orang	81.052.750
	D. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
	<i>Sub Kegiatan:</i>				
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	9.985.625
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	32.532.500
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	20.378.250
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	35.065.000
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	35.002.500
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dok	10.188.000
	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	50.356.250

	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Lap	90.000.000
	E. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
	<i>Sub Kegiatan:</i>					
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	390.000.000
	2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	19.671.500
	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan/Diadakan	1	Unit	124.103.500
	F. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
	<i>Sub Kegiatan:</i>					
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lap	5.000.000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lap	190.079.622
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Lap	10.020.000
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lap	2.421.669.000
	G. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
	<i>Sub Kegiatan:</i>					
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	Unit	501.334.150
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	29.433.600
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	99.844.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
	<i>Kegiatan:</i>					
	A. PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/ KOTA					
	<i>Sub Kegiatan:</i>					

	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Dok	100.000.000
	B. PENYEDIAAN PERLENGKAAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA					
	<i>Sub Kegiatan:</i>					
	1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4	Paket	96.278.322
	2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4	Paket	909.800.000
	C. PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C					
	<i>Sub Kegiatan:</i>					
	1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1	Unit	30.000.000
	D. PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR					
	<i>Sub Kegiatan:</i>					
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Lap	165.216.525
	E. PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR					
	<i>Sub Kegiatan:</i>					
	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2	Unit	100.000.000
	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Orang	32.000.000
	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	12	Bulan	56.694.000
	4	Penyediaan Buku Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.000	Dok	100.000.000
	5	Sosialisasi Standar operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Lap	50.130.000
	6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	8	Unit	125.997.133
	F. PELAKSANAAN MANAJEMEN REKAYASA LALULINTAS					
	<i>Sub Kegiatan:</i>					
	1	Pengadaan, Pemasangan, perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka manajemen rekayasa lalu lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	25	Unit	35.600.000

	2	Forum Lalu-Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Lap	45.000.000
	G. PERSETUJIAN HASIL ANALISA DAMPAK LALULINTAS					
	<i>Sub Kegiatan:</i>					
	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	1	Lap	30.032.500
	H. PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	<i>Sub Kegiatan:</i>					
	1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Lap	229.850.000
	3 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
	<i>Kegiatan:</i>					
	A. PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN DAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN UNTUK KAPAL YANG MELAYANI PENYEBERANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	<i>Sub Kegiatan:</i>					
	1	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Dok	13.684.400
	2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Dok	38.656.100
	B. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal					
	<i>Sub Kegiatan:</i>					
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	1	Dok	13.740.800
	JUMLAH TOTAL					
						9.801.610.957

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akun tabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelapor anak untabilitas/pemberi amanah. Dinas Perhubungan selaku pengemban Amanah Masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkandalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akun tabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendaya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian Tingkat pencapaian target masing-masing indicator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indicator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indicator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran ata sindikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indicator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi kuantabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilaksanakan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dapat memberikan gambaran penilaian Tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian Tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	<i>Menurunkan kesenjangan Pembangunan antar wilayah</i>						
	<i>Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana angkutan umum</i>	<i>Cakupan aksesibilitas antar wilayah</i>	<i>36,50</i>	<i>35,00</i>	<i>95,86</i>	<i>Sangat Tinggi</i>	<i>Dinas Perhubungan</i>

Uraian penjelasan tabel :

Panjang jalan di Kabupten Asahan yang dilalui moda transportasi publik ditargetkan untuk Tahun 2023 sebesar 36,50 %, namun hanya dapat terpenuhi sebesar 35% (488,5 Km) dari total Panjang jalan (1.398,13 Km)

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada table berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	<i>Menurunkan kesenjangan Pembangunan antar wilayah</i>							
	<i>Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana angkutan umum</i>	<i>Cakupan aksesibilitas antar wilayah</i>	36,0 %	35,0%	97.22	36,50	35,00	95,86

Uraian penjelasan tabel :

Panjang jalan di Kabupten Asahan yang dilalui moda transportasi publik untuk tahun 2023 tidak mengalami perubahan dari tahun 2022 yaitu sebesar 35 % atau sepanjang 488,5 Km.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	<i>Menurunkan kesenjangan Pembangunan antar wilayah</i>				
	<i>Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana angkutan umum</i>	<i>Cakupan aksesibilitas antar wilayah</i>	35,00	38,00	92,10

Uraian penjelasan tabel :

Untuk mencapai target akhir di tahun 2026 sebesar 38%, Panjang jalan di Kabupten Asahan yang dilalui moda transportasi publik untuk tahun 2023 mengalami Tingkat kemajuan sebesar 92,10%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di sajikan pada table berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	<i>Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah</i>			-			
	<i>Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana angkutan umum</i>	<i>Cakupan aksesibilitas antar wilayah</i>	36,0 %	35,0%	97.22	Tidak bertambahnya Panjang lintasan trayek angkutan umum	Penambahan panjang lintasan trayek angkutan umum

Uraian penjelasan tabel :

Nilai cakupan aksesibilitas antar wilayah tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya hal ini karena tidak bertambahnya panjang lintasan trayek angkutan umum.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Saran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah			-			
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana angkutan umum	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	97.22	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
				Kegiatan:			
				A. PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/ KOTA			
				Sub Kegiatan:			
				1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-
				B. PENYEDIAAN PERLENGKAAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA			
				Sub Kegiatan:			
				1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100	Menunjang
				2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100	Menunjang
				C. PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C			
				Sub Kegiatan:			
				1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	100	Menunjang
				D. PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR			
				Sub Kegiatan:			
				1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				E. PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR			
				Sub Kegiatan:			
							Menunjang

				1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	100	Menunjang	
				2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	Menunjang	
				3 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	100	Menunjang	
				4 Penyediaan Buku Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	Menunjang	
				5 Sosialisasi Standar operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	Menunjang	
				6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	100	Menunjang	
				F. PELAKSANAAN MANAJEMEN REKAYASA LALULINTAS				
				Sub Kegiatan:				
				1 Pengadaan, Pemasangan, perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka manajemen rekayasa lalulintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100	Menunjang	
				2 Forum Lalu-Lintas Angutan Jalan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100	Menunjang	
				G. PERSETUJIAN HASIL ANALISA DAMPAK LALULINTAS				
				Sub Kegiatan:				
				1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	100	Menunjang	
				H. PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Sub Kegiatan:				
				1 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100	Menunjang	

Uraian penjelasan tabel :

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana angkutan umum dapat di tunjang dengan melaksanakan 15 sub kegiatan yang di laksanakan di tahun 2023.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

N0	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	<i>Kegiatan:</i>			
	A PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			
	<i>Sub Kegiatan:</i>			
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.900.000	9.896.510	99,96
	B ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
	<i>Sub Kegiatan:</i>			
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.478.445.374	3.232.281.608	92,92
	C ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	163.930.000	162.855.000	99,34
	2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	81.052.750	79.252.000	97,78
	D ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			
	<i>Sub Kegiatan:</i>			
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.985.327	14.880.500	99,30
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.532.500	32.531.200	100,00
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.998.750	29.980.300	99,94
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.065.000	35.065.000	100,00
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.249.500	47.247.500	100,00
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.186.000	15.150.000	99,76
	7 Penyediaan Bahan/Material	10.356.250	8.748.000	84,47
	8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.000.000	139.836.669	99,88

	E PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
	Sub Kegiatan:			
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	390.000.000	359.000.000	92,05
	2 Pengadaan Mebel	19.671.500	19.600.000	99,64
	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.001.000	129.380.000	99,52
	F PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
	Sub Kegiatan:			
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.992.000	99,84
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.077.871	149.832.932	85,58
	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.010.000	15.000.000	99,93
	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.402.229.000	2.387.904.000	99,40
	G PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
	Sub Kegiatan:			
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	490.398.186	482.036.508	98,29
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104.836.200	104.150.000	99,35
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.433.600	44.400.000	99,92
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
	Kegiatan:			
	A PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/ KOTA			
	Sub Kegiatan:			
	1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100.000.000	-	-
	B PENYEDIAAN PERLENGKAAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA			
	Sub Kegiatan:			
	1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	96.278.322	96.000.000	99,71
	2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	914.600.000	912.602.800	99,78
	C PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C			
	Sub Kegiatan:			
	1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	10.000.080	10.000.000	100,00
	D PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR			
	Sub Kegiatan:			
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	200.416.525	200.202.500	99,89

E	PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR			
	<i>Sub Kegiatan:</i>			
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000	98.500.000	98,50
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	32.000.000	31.482.000	98,38
3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	56.694.000	56.694.000	100,00
4	Penyediaan Buku Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000	150.000.000	100,00
5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor	50.130.000	50.130.000	100,00
6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	125.997.133	124.984.000	99,20
F	PELAKSANAAN MANAJEMEN REKAYASA LALULINTAS			
	<i>Sub Kegiatan:</i>			
1	Pengadaan, Pemasangan, perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalanan dalam rangka manajemen rekayasa lalulintas	35.600.000	35.600.000	100,00
2	Forum Lalu-Lintas Angutan Jalan	15.000.000	14.970.000	99,80
G	PERSETUJIAN HASIL ANALISA DAMPAK LALULINTAS			
	<i>Sub Kegiatan:</i>			
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	30.032.500	29.932.500	99,67
H	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	<i>Sub Kegiatan:</i>			
1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	244.850.000	244.563.000	99,88
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
	<i>Kegiatan:</i>			
A	PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN DAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN UNTUK KAPAL YANG MELAYANI PENYEBERANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	<i>Sub Kegiatan:</i>			
1	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	38.656.100	25.151.530	65,06
	JUMLAH TOTAL	10.035.613.468	9.584.832.057	95,51

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atasefisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian Tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada table berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	<i>Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah</i>			-				
	<i>Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana angkutan umum</i>	36,0 %	35,0%	97,22	10.035.613.468	9.584.832.057	95,51	1,71

Note:

Jika Tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka **tidak efisien**

Jika Tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka **efisien**

Uraian penjelasan tabel :

Dengan pagu Dinas Perhubungan untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 10.035.613.468 dan realisasi anggaran sebesar Rp 9.584.832.057 dianggap efisien dengan pencapaian indikator kinerja sebesar 97,22%.

Analisis atasefisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada table berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	<i>Kegiatan:</i>						
	A. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
	<i>Sub Kegiatan:</i>						
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	100	9.900.000	9.896.510	99,96
	B. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
	<i>Sub Kegiatan:</i>						
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	35 Orang	100	3.478.445.374	3.232.281.608	92,92
	C. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH						
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	100	163.930.000	162.855.000	99,34
	2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	500 Orang	500 Orang	100	81.052.750	79.252.000	97,78
	D. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
	<i>Sub Kegiatan:</i>						
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100	14.985.327	14.880.500	99,30
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	100	32.532.500	32.531.200	100,00
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	100	29.998.750	29.980.300	99,94
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	100	35.065.000	35.065.000	100,00
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100	47.249.500	47.247.500	100,00
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dok	12 Dok	100	15.186.000	15.150.000	99,76
	7 Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	1 Paket	100	10.356.250	8.748.000	84,47

	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Lap	1	Lap	100	140.000.000	139.836.669	99,88	
	E. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH										
	<i>Sub Kegiatan:</i>										
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Unit	1	Unit	100	390.000.000	359.000.000	92,05	
	2	Pengadaan Mebel	1	Paket	1	Paket	100	19.671.500	19.600.000	99,64	
	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	1	Unit	100	130.001.000	129.380.000	99,52	
	F. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
	<i>Sub Kegiatan:</i>										
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lap	1	Lap		5.000.000	4.992.000	99,84	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Lap	1	Lap		175.077.871	149.832.932	85,58	
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Lap	1	Lap		15.010.000	15.000.000	99,93	
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Lap	1	Lap		2.402.229.000	2.387.904.000	99,40	
	G. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
	<i>Sub Kegiatan:</i>										
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20	Unit	20	Unit	100	490.398.186	482.036.508	98,29	
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	Unit	2	Unit	100	104.836.200	104.150.000	99,35	
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	Unit	6	Unit	100	44.433.600	44.400.000	99,92	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										
	<i>Kegiatan:</i>										
	A. PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/ KOTA										
	<i>Sub Kegiatan:</i>										
	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Dok	-	Dok	-	100.000.000	-	-	
	B. PENYEDIAAN PERLENGKAAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA										

	Sub Kegiatan:								
	1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4	Paket	4	Paket	100	96.278.322	96.000.000	99,71
	2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4	Paket	4	Paket	100	914.600.000	912.602.800	99,78
	C. PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C								
	Sub Kegiatan:								
	1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	1	Unit	1	Unit	100	10.000.080	10.000.000	100,00
	D. PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR								
	Sub Kegiatan:								
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Lap	1	Lap		200.416.525	200.202.500	99,89
	E. PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR								
	Sub Kegiatan:								
	1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	Unit	2	Unit	100	100.000.000	98.500.000	98,50
	2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	Orang	2	Orang	100	32.000.000	31.482.000	98,38
	3 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12	Bulan	12	Bulan	100	56.694.000	56.694.000	100,00
	4 Penyediaan Buku Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	6.000	Dok	6000	Dok	100	150.000.000	150.000.000	100,00
	5 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor	1	Lap	1	Lap	100	50.130.000	50.130.000	100,00
	6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8	Unit	8	Unit	100	125.997.133	124.984.000	99,20
	F. PELAKSANAAN MANAJEMEN REKAYASA LALULINTAS								
	Sub Kegiatan:								
	1 Pengadaan, Pemasangan, perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka manajemen rekayasa lalulintas	25	Unit	25	Unit	100	35.600.000	35.600.000	100,00
	2 Forum Lalu-Lintas Angutan Jalan	1	Lap	1	Lap	100	15.000.000	14.970.000	99,80
	G. PERSETUJIAN HASIL ANALISA DAMPAK LALULINTAS								

	Sub Kegiatan:								
	1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	1	Lap	1	Lap	100	30.032.500	29.932.500	99,67
	H. PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN /KOTA								
	Sub Kegiatan:								
	1 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Lap	1	Lap		244.850.000	244.563.000	99,88
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								
	Kegiatan:								
	A. PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN DAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN UNTUK KAPAL YANG MELAYANI PENYEBERANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Sub Kegiatan:								
	1 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Dok	1	Dok	100	38.656.100	25.151.530	65,06
	JUMLAH TOTAL						10.035.613.468	9.584.832.057	95,51

Uraian penjelasan tabel :

Untuk setiap indikator kegiatan bila diperhatikan dari table diatas dapat tercapai dengan anggaran yang tersedia, kecuali kegiatan “Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota”. Kegiatan ini tidak dapat di laksanakan karena kurangnya tenaga ahli yang dapat menyelesaikan kajian tersebut, sehingga anggarannya di kembalikan menjadi silva anggaran

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai Upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Tahun 2023 Ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 95,86% (kategori Sangat Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 (satu) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.**10.035.613.468** Sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp **9.584.832.057**, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2023 serapan anggaran sebesar **95,51%** dan nilai efisiensi anggaran sebesar **1,7%**.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders atau pun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi pasiaaktif untuk membangun Kabupaten Asahan.

Kisaran, Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ASAHAN.

SOFIAN MANULLANG S.Sos
PEMBINAUTAMA MUDA
NIP. 19701106 199706 1 001

LAMPIRAN